

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia tidak bisa lepas dari pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan di setiap negara. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dalam pasal 1 disebutkan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, mengembangkan segala potensi yang dimiliki peserta didik melalui proses pembelajaran.

Pendidikan adalah hak setiap warga Negara Indonesia, apapun keadaannya setiap warga Negara berhak menerima pendidikan yang sama. Seperti dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1: "Setiap warga Negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan". Setiap anak-anak berkebutuhan khusus atau ABK seperti, tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, anak-anak berkesulitan belajar, dan anak-anak gifted serta anak-anak dengan keadaan sosial ekonomi rendah ataupun yang berada di wilayah terpencil harus

mendapatkan pendidikan yang sama dengan anak-anak yang lain. Salah satu implikasi dari pernyataan di atas adalah munculnya konsep pendidikan inklusif. Undang-undang No 20 tahun 2003 pasal 11 ayat 1 tentang kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah adalah Pemerintah dan Pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminatif.

Pengakuan bahwa pendidikan tanpa diskriminatif bagi setiap warga negara menunjukkan bahwa setiap anak memperoleh hak yang sama dalam mendapatkan layanan pendidikan yang dapat mengakomodasi setiap kebutuhan masing-masing peserta didik. Layanan pendidikan yang dapat mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus bersama-sama dengan anak normal lainnya dalam kelas reguler. Anak-anak berkebutuhan khusus dapat mengikuti program-program pembelajaran yang ada di sekolah bersama-sama dengan anak normal lainnya.

Perkembangan konsep pendidikan inklusif di Indonesia mulai ramai di perbincangkan pada tahun 1990-an dalam bentuk seminar-seminar, diskusi panel dan sejenisnya. Kemudian mulai diwujudkan dengan penunjukan beberapa sekolah untuk melaksanakan program inklusif. Dengan dikeluarkannya peraturan menteri pendidikan nasional no. 7 tahun 2009 pasal 4, yang menyebutkan setiap pemerintah kabupaten/kota harus menunjuk satu SD atau SMP untuk melaksanakan program inklusif. Implikasi

dari kebijakan tersebut adalah ditunjuknya beberapa sekolah negeri dari tingkat dasar sampai menengah di beberapa kota untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif, salah satunya di Kota Tangerang. Saat ini sudah ada 12 sekolah negeri di Kota Tangerang yaitu 11 SD Negeri dan 1 SMP Negeri yang sudah menyelenggarakan pendidikan inklusif.

Berkembangnya sekolah inklusif secara kuantitas di Kota Tangerang maka perlu diimbangi dengan pengembangan kualitas pendidikan inklusif di sekolah. Oleh karena itu, perlu diperhatikan beberapa aspek dalam penyelenggaraan sekolah inklusif antara lain: 1) Pengembangan sikap yang positif pada para pendidik adalah poin utama untuk menyempurnakan pendidikan inklusif; 2) Kebijakan dan kepemimpinan yang mendukung; 3) Proses yang terjadi dalam sekolah dan kelas berdasarkan pada praktek dari penelitian; 4) Kurikulum dan pedagogik yang fleksibel; 5) Keterlibatan masyarakat; 6) Adanya refleksi; 7) Kebutuhan akan sumber daya dan pelatihan. Seperti yang telah disebutkan di atas, guru memiliki pengaruh yang signifikan dalam penyelenggaraan sekolah inklusif, karena guru adalah elemen penting dalam proses belajar mengajar. Kesuksesan program inklusif tergantung pada persiapan awal para guru dalam memulai dan pelatihan bagi guru mengenai hal-hal yang dibutuhkan dalam sekolah inklusif. Akibat dari ketidaksiapan yang dirasakan guru untuk mengajar anak dengan kebutuhan khusus adalah mereka seringkali memiliki perasaan negatif dan memiliki konsep yang salah berkaitan dengan ABK .

Sikap guru terhadap pendidikan inklusif adalah sebuah respon evaluatif yang merupakan organisasi dari pendapat, keyakinan seorang guru terhadap pendidikan inklusif yang didasari oleh perasaan tertentu dan menjadi dasar bagi guru untuk merespon dan memunculkan perilaku yang berhubungan dengan pendidikan inklusif. Sikap tersebut bisa positif atau negatif.

Sikap guru yang positif terhadap pendidikan inklusif ditunjukkan melalui penerimaan guru terhadap kehadiran anak berkebutuhan khusus di dalam kelas yang diajar, pandangan bahwa semua anak memiliki karakteristik dan kebutuhan masing-masing, serta harapan dan dukungan terhadap pendidikan inklusif. Sedangkan sikap guru yang negatif ditunjukkan dengan kurang mendukungnya guru terhadap penempatan anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif dan juga pandangan guru yang negatif terhadap anak berkebutuhan khusus.

Berdasarkan pengamatan yang ditemukan di lapangan bahwa penanganan guru terhadap siswa berkebutuhan khusus masih belum maksimal. Hal tersebut digambarkan pada siswa berkebutuhan khusus di salah satu sekolah inklusif wilayah Kota Tangerang saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Siswa berkebutuhan khusus tersebut tidak fokus dan bermain di bangkunya saat guru kelas sedang membawakan pelajaran. Namun guru kelas tetap melanjutkan kegiatan belajar mengajar untuk siswa

reguler lainnya tanpa memberikan pengertian terlebih dahulu kepada siswa tersebut untuk dapat memperhatikan pelajaran.

Hal lainnya digambarkan di sekolah inklusif berbeda. Penanganan guru terhadap siswa berkebutuhan khusus sangat hangat dan ramah. Hal tersebut terbukti dengan penempatan duduk siswa di bagian depan agar guru dapat dengan mudah memperhatikan dan memberi pengarahan pada siswa berkebutuhan khusus tersebut agar dapat memahami pelajaran. Kurangnya guru yang berlatar belakang pendidikan khusus juga menjadi timbulnya sikap negatif pada guru.

Peneliti melihat dari salah satu sekolah dasar yang terdapat di wilayah kota Tangerang pendapat dari guru menyatakan bahwa menolak sekolahnya dijadikan sekolah inklusif dikarenakan akan menimbulkan hambatan pada proses pembelajaran yang berlangsung pada siswa reguler. Hal tersebut dinyatakan dikarenakan terkait guru yang ada pada sekolah tersebut bukan berlatar belakang pendidikan khusus.

Maka dari itu peneliti mempunyai keinginan untuk meneliti lebih lanjut mengenai sikap guru terhadap pendidikan inklusif di Sekolah Dasar Wilayah Kota Tangerang untuk mengetahui lebih dalam informasi bagaimana sikap guru terhadap pendidikan inklusif di Sekolah Dasar penyelenggara pendidikan inklusif Wilayah Kota Tangerang.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan oleh peneliti, terdapat beberapa sikap guru terhadap pendidikan inklusif yang dapat diidentifikasi sebagai berikut

1. Apakah sikap guru positif terhadap pendidikan inklusif di Sekolah Dasar Wilayah Kota Tangerang?
2. Apakah sikap guru negatif terhadap pendidikan inklusif di Sekolah Dasar Wilayah Kota Tangerang?
3. Bagaimanakah sikap guru terhadap pendidikan inklusif di Sekolah Dasar Wilayah Kota Tangerang?

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi penelitian maka pembatasan fokus masalah adalah sebagai berikut :

1. Sikap Guru terhadap Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Wilayah Kota Tangerang.
2. Sikap Guru terhadap pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Wilayah Kota Tangerang mengacu pada tiga dimensi yaitu kognitif, afektif dan konatif.
3. Sikap Guru terhadap pendidikan Inklusif di SDN Cimone 4, SDN Karawaci, SDN Karawaci 20, SD Muhammadiyah 4, SDN Peninggilan

1, SDN Peninggilan 7, dan SDN Tanah Tinggi 03 penyelenggara pendidikan Inklusif Wilayah Kota Tangerang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian maka rumusan masalahnya adalah : “Bagaimanakah sikap guru terhadap pendidikan inklusif di Sekolah Dasar penyelenggara pendidikan inklusif wilayah Kota Tangerang?”.

E. Manfaat Penelitian

Setelah penelitian selesai diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang terkait yaitu :

1. Sekolah

Masukan bagi sekolah tentang gambaran sikap guru terhadap pendidikan inklusif.

2. Guru

Sebagai informasi bagi para guru untuk dapat bersikap positif terhadap pendidikan inklusif.

3. Mahasiswa PLB

Memberikan pengetahuan bagi masyarakat sehingga masyarakat lebih memahami tentang sikap guru terhadap pendidikan inklusi.

4. Peneliti Selanjutnya

Memberikan acuan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian. Lanjutan penelitian dengan responden yang lebih banyak dan wilayah yang luas.